

BAB II

PROFIL PASANGAN CALON DAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG

Dalam BAB ini akan membahas terkait dengan deskripsi objek penelitian yang diawali dengan deskripsi profil pasangan Ganjar-Yasin, Partai Pengusung Ganjar-Yasin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Deskripsi PDI Perjuangan provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan dokumen *Legislator Summit* dan deskripsi mengenai Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan Jawa Tengah.

2.1. Profil Pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen

 H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP Kader Partai 	Tempat Lahir	Kabupaten Karanganyar
	Tanggal Lahir	28 Oktober 1968
	Almamater	Universitas Gadjah Mada (Sarjana Hukum) Universitas Indonesia (Magister Ilmu Politik)
	Alamat	Jalan Gajahmungkur, Kota Semarang
	Profesi	Konsultan HRD Anggota DPR RI Komisi IV Wakil Ketua Komisi II DPR RI Gubernur Jawa Tengah periode 2009-2013 Gubernur Jawa Tengah 2018-Sekarang

Sumber: diolah dari berbagai sumber

 <p>H. Taj Yasin Maimoen</p> <p>Kader Partai</p> 	Tempat Lahir	Kabupaten Rembang
	Tanggal Lahir	2 Juli 1983
	Almamater	Pondok Pesantren Al Anwar
	Alamat	Desa Karangmangu, Serang, Kabupaten Rembang
	Profesi	Pengurus Anak Cabang PPP Pengurus DPW PPP Jawa Tengah Anggota DPRD Jawa Tengah Komisi E Ketua GP Anshor Jawa Tengah Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-Sekarang

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen merupakan pasangan yang keduanya lahir dan besar di Jawa Tengah, selain itu keduanya merupakan pasangan yang lahir dan menjadi kader dari Parpol. Ganjar Pranowo merupakan kader PDI Perjuangan dimana mulai merintis karirnya sejak lulus dari Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada dan Taj Yasin Maimoen merupakan kader PPP yang berangkat dari bawah atau menjadi Pengurus Anak Cabang hingga menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP di Provinsi Jawa Tengah.

2.2. Profil Partai Pengusung Ganjar-Yasin

Pasangan Ganjar-Yasin diusung oleh beberapa partai politik di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sendiri merupakan kader dari PDI Perjuangan yang secara langsung menjadi partai pengusung. Sedangkan pasangannya yakni Taj Yasin Maimoen merupakan kader dari Fraksi PPP yang duduk

dikursi DPRD Jateng Komisi E yang secara langsung juga mendapatkan dukungan dari PPP untuk maju menjadi calon wakil gubernur bersama Ganjar. Total pasangan Ganjar-Yasin diusung oleh lima partai politik yakni PDI Perjuangan, PPP, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai NasDem. Berikut partai politik pengusung pasangan Ganjar-Yasin dalam Pemilu Jawa Tengah tahun 2018.

Tabel 2.1

Partai Pengusung Pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen

NO	Partai	Logo Partai
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	
3	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	
4	Partai Golkar	
5	Partai Demokrat	

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dari tabel dapat dijelaskan bahwasanya seluruh keputusan dari masing-masing Partai Politik pengusung Ganjar-Yasin sudah disetujui oleh tingkat pusat atau DPP seluruh Parpol pengusung Ganjar-Yasin. Surat Keputusan berisikan tentang persetujuan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akan maju dalam Pemilu tahun 2018

semuanya sudah disetujui dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing partai politik pengusung Ganjar-Yasin dalam Pemilu 2018.

2.3. Profil Singkat PDI Perjuangan

Pada tanggal 14 Februari 1999, Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan perubahan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selanjutnya disingkat PDI Perjuangan. PDI Perjuangan merepresentasikan ideologi-ideologi politik nasionalis-kerakyatan. Pada masa Orde Baru, PDI Perjuangan bersama dengan PPP sekedar menjadi partai pelengkap penguasa, yaitu Golkar.

Perolehan suara PDI Perjuangan senantiasa dibawah 15 Persen pada tahun 1999, pemilu pertama pasca otoritarisme Orde Baru, PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu (34 persen). Bahkan, pada Pemilu tahun 1999 PDI Perjuangan mengantarkan Megawati Soekarnoputri menjadi wakil presiden mendampingi Abdul Rahman Wahid, dan setelah Abdul Rahman Wahid dilengserkan oleh politik parlemen, Megawati Soekarnoputri kemudian menjadi presiden.

Pada Pemilu 2004 perolehan suara PDI Perjuangan mendapatkan 18 persen, dan turun lagi dalam Pemilu 2009 menjadi 14 persen suara nasional. Pada rentang waktu dua periode pemerintahan, yaitu hasil pemilu 2004 dan 2009, PDI Perjuangan mendeklarasikan diri menjadi partai oposisi

pemerintah. Rentang waktu antara tahun 2004 - 2009 PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang mengambil sikap oposisional terhadap pemerintah, sedangkan pada masa pasca Pemilu tahun 2009 PDI Perjuangan dan Hanura menjadi partai oposisi pemerintah.

Berdasarkan hasil kongres III PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach. Pada bulan April 2010 yang lalu, Megawati Soekarnoputri kembali terpilih untuk menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan Periode 2010-2015, dan hingga pada tahun 2018 ini, Megawati Soekarnoputri masih menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dalam acara Rakornas dan HUT PDI Perjuangan ke 46 tahun di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

Visi Misi PDI Perjuangan dan Tugas Fungsi Partai

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat Anggaran Dasar PDI Perjuangan Partai adalah:

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila)

- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualism dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila)
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8,9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Partai Mempunyai Tujuan Umum:

- a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Partai Mempunyai Tujuan Khusus:

- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Partai Mempunyai Fungsi:

- a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Partai Mempunyai Tugas :

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
- e. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

2.4. PDI Perjuangan Jawa Tengah

Sejak tahun 2014 PDI Perjuangan adalah partai pemerintah, ini dikarenakan PDI Perjuangan meraih kemenangan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun sebagai negara yang menganut system multi partai, kemenangan ditingkat pusat tidak sepenuhnya berjalan parallel dengan kondisi politik yang berada

ditingkat daerah. Frakmentasi kekuatan politik tergambar dari level provinsi, Jawa Tengah misalnya, merupakan provinsi yang masih dikatakan parallel dengan pusat yang artinya PDI Perjuangan Jawa Tengah adalah pemilik kursi mayoritas dengan 27 kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah dan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari PDI Perjuangan.

Untuk 35 daerah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah peta kekuatan politik cukup dikatakan variative, PDI Perjuangan memperoleh kursi mayoritas di sebagian daerah kabupaten/kota, demikian pula untuk jabatan Bupati/Walikota ada yang kemenangan politik menggambarkan kombinasi mayoritas di DPRD dan Kepala Daerah yang juga berasal dari PDI Perjuangan. Berikut adalah tabel Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah juga tabel Fraksi DPRD setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah hingga pengurus tingkat ranting PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Tabel 2.2**Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Kader PDI Perjuangan****Provinsi Jawa Tengah**

NO	Kabupaten/Kota	Nama	Jabatan
1.	Kota Semarang	Hendrar Prihadi, SE, MM	Walikota
		Ir. Hj. Havearita.G.R.	Wakil Walikota
2.	Kabupaten Semarang	Dr. H. Munjirin, ES. Sp. OG	Bupati
		Ngesti Nugraha, SH	Wakil Bupati
3.	Kabupaten Kudus	H. Mustofa, SE, MM	Bupati
4.	Kabupaten Grobogan	Hj. Sri Sumarni, SH, MM	Bupati
5.	Kabupaten Wonogiri	Joko Sutopo	Bupati
		Edy Santoso, SH	Wakil Bupati
6.	Kabupaten Boyolali	Drs. Seno Samodro	Bupati
		M. Said Hidayat, SH	Wakil Bupati
7.	Kota Surakarta	FX. Hadi Rudyatmo	Walikota
		Achmad Purnomo	Wakil Walikota
8.	Kabupaten Sukoharjo	H. Wardoyo Wijaya, SH, MH	Bupati
		Purwadi, SE, MM	Wakil Bupati
9.	Kabupaten Klaten	Hj. Sri Hartini	Bupati
		Sri Mulyani	Wakil Bupati
10.	Kota Magelang	Ir. Sigit Widyonindito	Walikota
		Dra. Windarti Agustina	Wakil Walikota
11.	Kabupaten Magelang	Zaenal Arifin, S.IP	Bupati
12.	Kabupaten Temanggung	Drs. HM. Bambang Sukarno	Bupati
		Irawan Prasetiadi	Wakil Bupati
13.	Kabupaten Purbalingga	H. Tasdi, SH, MM	Bupati
		Dyah Ayuning P, Bc.Econ,SE	Wakil Bupati
14.	Kabupaten Banjarnegara	Drs. H. Hadi Supeno, M.Si	Wakil Bupati
15.	Kabupaten Banyumas	Ir. H. Achmad Husein	Bupati
		Dr. Budhi Setiawan	Wakil Bupati
16.	Kota Pekalongan	H. Achmad Alf Arslan J, SE	Walikota
		H. M Saelani Machfudz	Wakil Walikota
17.	Kabupaten Brebes	Hj. Idza Priyanti, SE	Bupati
		Narjo, SH	Wakil Bupati
18.	Kabupaten Pemasang	H. Junaedi, SH, MH	Bupati
		Drs. H. Martono	Wakil Bupati

Sumber : DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah 2017

Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam tabel di atas merupakan kader PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah, baik yang menjadi Kepala Daerah Kabupaten/Kota diseluruh Jawa Tengah. Dalam mekanisme gotong royong dalam setiap kegiatan atau aktivitas politik tentu merupakan sebuah kepedulian kader yang berada dikursi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan pola gotong royong PDI Perjuangan. Selain kader dari kursi Kepala Daerah pola gotong royong juga dilaksanakan oleh kader PDI Perjuangan yang menjadi anggota legislatif ataupun bahkan struktural DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting yang berada diseluruh Jawa Tengah yang memiliki kepedulian terhadap gotong royong yang tidak memiliki unsur mengikat ataupun menekan seluruh kader.

Tabel 2.3

Jumlah Pengurus Partai Menurut Struktur dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	DPC	PAC	Ranting	Fraksi PDIP Kab/Kota
		Σ Pengurus	Σ Kecamatan	Σ Desa/Kelurahan	
1.	Kota Semarang	17	16	177	15
2.	Kabupaten Semarang	15	19	235	11
3.	Kabupaten Kendal	17	20	286	9
4.	Kota Salatiga	11	4	22	8
5.	Kabupaten Demak	15	14	249	8
6.	Kabupaten Kudus	15	9	131	9
7.	Kabupaten Jepara	15	16	199	10
8.	Kabupaten Blora	15	16	295	6
9.	Kabupaten Pati	19	21	406	8
10.	Kabupaten Rembang	15	14	294	4
11.	Kabupaten Grobogan	15	19	280	12
12.	Kabupaten Sragen	15	20	208	11

13.	Kabupaten Karanganyar	15	17	177	14
14.	Kabupaten Wonogiri	15	25	294	13
15.	Kota Surakarta	13	5	51	24
16.	Kabupaten Klaten	17	26	401	17
17.	Kabupaten Boyolali	15	19	267	25
18.	Kabupaten Sukoharjo	16	12	167	22
19.	Kota Magelang	11	3	17	7
20.	Kabupaten Magelang	15	21	372	10
21.	Kabupaten Temanggung	15	29	231	7
22.	Kabupaten Wonosobo	15	15	270	9
23.	Kabupaten Purworejo	15	16	494	8
24.	Kabupaten Kebumen	17	26	460	9
25.	Kabupaten Purbalingga	15	18	239	11
26.	Kabupaten Banjarnegara	15	20	278	6
27.	Kabupaten Cilacap	17	24	284	9
28.	Kabupaten Banyumas	17	27	337	16
29.	Kota Tegal	11	4	27	8
30.	Kabupaten Tegal	17	18	287	11
31.	Kabupaten Brebes	15	17	297	11
32.	Kabupaten Batang	15	15	248	10
33.	Kabupaten Pekalongan	17	19	285	11
34.	Kota Pekalongan	11	4	47	4
35.	Kabupaten Pemalang	17	14	222	13
Jumlah		559	573	8.534	413

Sumber : DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah 2017

Dari dua tabel di atas jelas bahwa PDI Perjuangan Jawa Tengah memiliki anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebar di tiga puluh lima daerah dengan perolehan suara lebih dari sepuluh kursi di beberapa daerah seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang, dengan jumlah kursi terbanyak diraih Kabupaten Boyolali dengan 25 kursi.

Gambaran kemenangan tersebut masih bisa ditelusuri lagi artinya bisa lebih dari peringkat sepuluh keatas karena yang memperoleh dibawah sepuluh kursi juga ada yang menduduki peringkat pertama dalam perolehan kursi di DPRD Kabupaten/Kota. Gambaran tersebut di atas memperlihatkan peta kekuatan politik PDI Perjuangan di Jawa Tengah menempatkan PDI Perjuangan pada posisi sangat meyakinkan untuk mengembangkan fungsi yang diemban dalam pencapaian pemerintah baik pusat ataupun pemerintah daerah.

Dari dua tabel di atas juga merupakan komposisi dan personalia anggota PDI Perjuangan yang melaksanakan gotong royong dalam hal pembiayaan pemilu, namun dalam pelaksanaanya tidak ada paksaan atau penekanan dari Partai untuk seluruh anggota yang berada didalam tabel di atas. Hal ini juga berlaku dalam pembiayaan gotong royong dalam pemenangan Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018, dimana partai tidak melakukan penekanan atau bersifat memaksa anggotanya untuk melaksanakan gotong royong, ini dikarenakan PDI Perjuangan dalam melaksanakan gotong royong juga melihat kemampuan dan kedaulatan ekonomi masing-masing anggota PDI Perjuangan khususnya PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam Pemilukada tahun 2018.

2.5. Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan

Pembiayaan untuk kampanye Pemilu, PDI Perjuangan menggunakan sejumlah sumber pembiayaan :

1. Iuran dari tiap anggota PDI Perjuangan di daerah yang sedang melaksanakan Pemilu sebagai sumber pertama pembiayaan.
2. Sumbangan dari calon legislatif yang bergotong royong dan dikelola secara mandiri di internal Partai untuk dilaporkan secara integrasi kepada KPU.
3. Dana dari DPP PDI Perjuangan yang diperoleh secara gotong royong baik anggota, pengurus ataupun anggota fraksi PDI Perjuangan.
4. Gotong Royong merupakan tradisi PDI Perjuangan untuk meringankan beban biaya pemilu yang tidak murah atau bisa dikatakan PDI Perjuangan dalam melakukan pembiayaan politik menggunakan semboyan “Ringan ama dijinjing, berat sama dipikul”

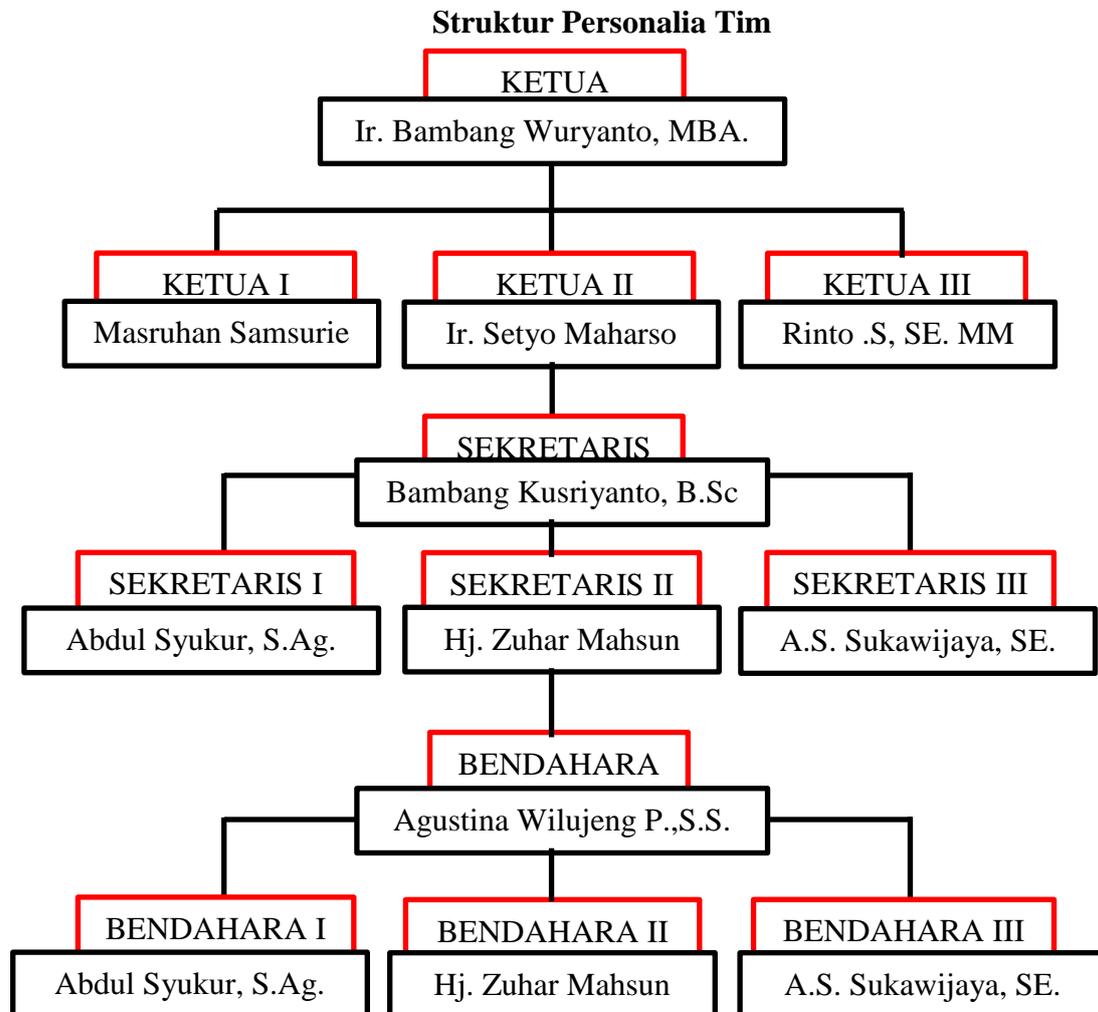
Pembiayaan Gotong Royong adalah sebuah model pengelolaan keuangan PDI Perjuangan yang berdasar pada nilai-nilai Gotong Royong. Gotong Royong sebagai nurani Pancasila dan Gotong Royong sebagai modal sosial bermasyarakat adalah dua hal yang mendasari terbentuknya pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan. Hal ini dijelaskan bahwasanya seluruh kader PDI Perjuangan menjunjung tinggi Gotong Royong dalam berpartai demi kesejahteraan dan terwujudnya cita-cita partai PDI Perjuangan. Pola Pembiayaan Gotong Royong untuk mengelola dana partai dengan konsep *Fund Raising* yang secara langsung menunjukan

kesadaran partai politik dalam membangun sebuah budaya partai yang positif.

PDI Perjuangan dengan Pola Pembiayaan Gotong Royong juga akan berdaulat dibidang keuangan partai, keuangan partai yang dikelola dengan Pola Gotong Royong oleh setiap kader partainya. Pola Pembiayaan Gotong Royong memiliki skema yang sama sesuai dengan instruksi partai tentang Gotong Royong dalam membiayai kegiatan atau aktivitas politik namun tetap mengindahkan peraturan dari KPU. Dalam penelitian kali ini pembiayaan gotong royong dalam pemilu akan lebih lanjut mengenai bagaimana sumber pembiayaan gotong tersebut berasal dan juga bentuk dari pembiayaan gotong royong yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan dari berbagai komposisi dan personalia.

2.6. Tim Pemenangan Ganjar–Yasin DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah

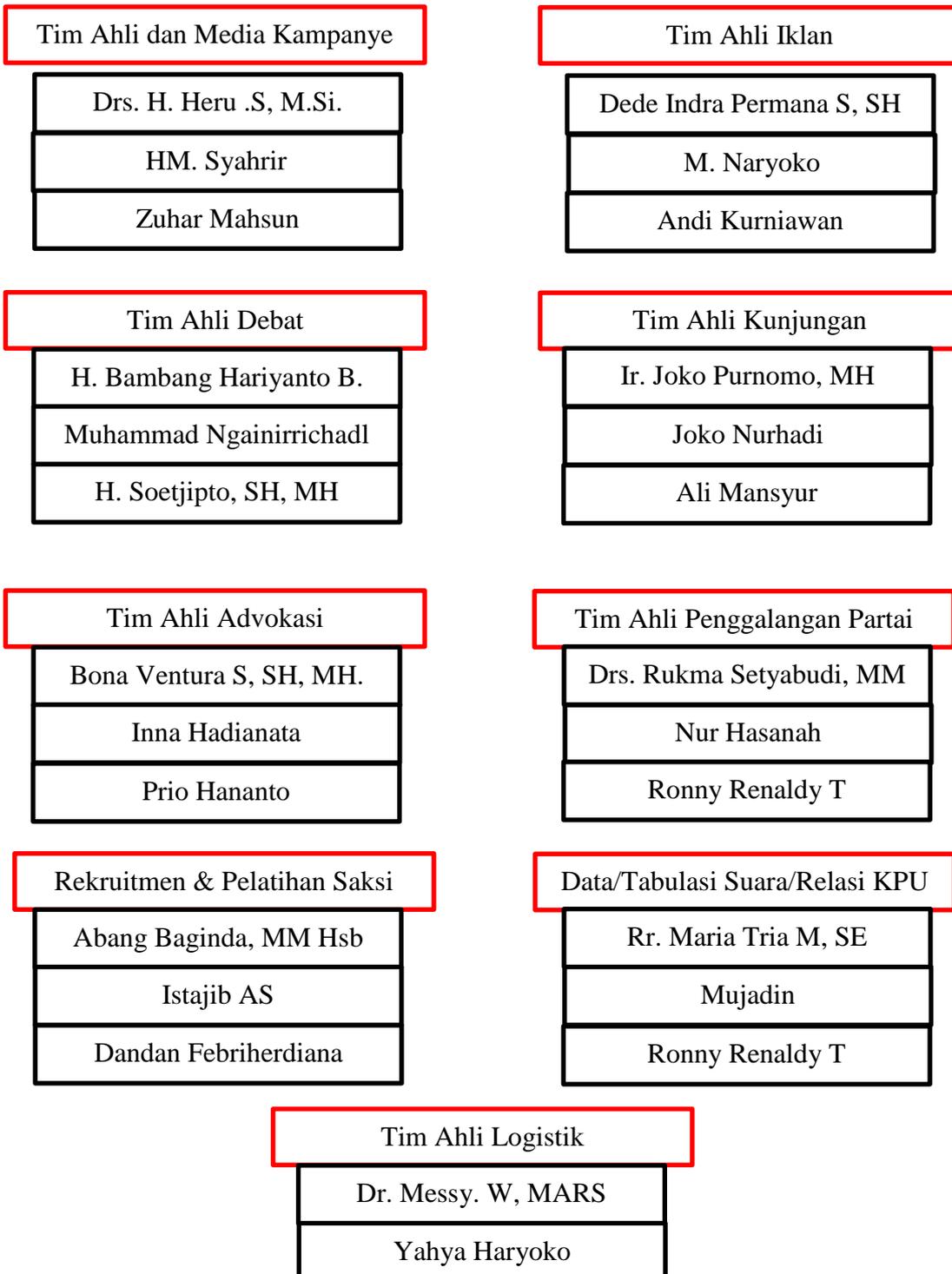
Bagan 2.1



Sumber : KPUD Jawa Tengah tahun 2018

Bagan 2.2

Tim Ahli Personalia



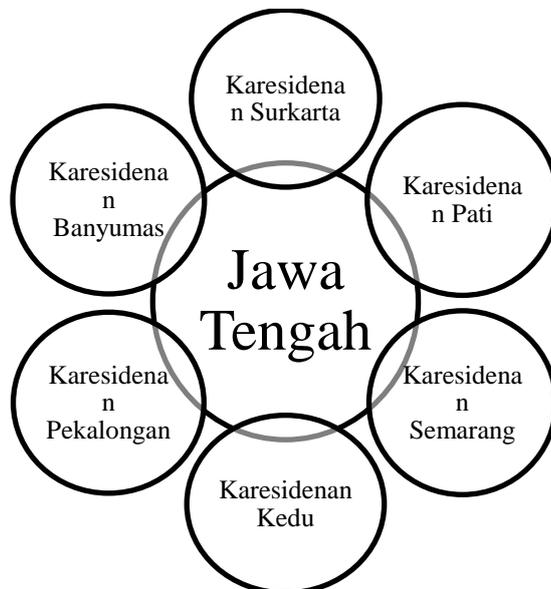
Sumber : KPUD Jawa Tengah tahun 2018.

Bagan di atas merupakan susunan Tim Pemenangan Ganjar-Yasin dan Tim Ahli Personalia yang berada ditingkat Jawa Tengah. Dalam pemenangan Pemilu Jawa Tengah tahun 2018, tim Pemenangan tingkat Provinsi Jawa Tengah memiliki susunan struktural DPD PDI Perjuangan. Hal ini dilaksanakan supaya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sudah memiliki pengalaman dalam menjadi struktural ditingkat DPD PDI Perjuangan. Hal-hal lain yang termasuk didalam pemenangan adalah tim ahli personalia, yang masing-masing memiliki keahlian khusus dalam bidang pemenangan secara organik.

2.7. Tim Pemenangan Ganjar–Yasin Tingkat Karesidenan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.1

Tim Pemenangan Tingkat Karesidenan



Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2019

Tabel di atas merupakan daftar anggota atau kader PDI Perjuangan yang menjadi Tim Pemenangan Ganjar-Yasin dalam Pemilu 2018. Dalam bagan dibawahnya merupakan Tim Pemenangan Tingkat Karesidenan. Masing-masing Karesidenan memiliki tiga pilar partai dalam hal ini adalah Calon, Legislatif dan DPC. Setiap DPC dimasing-masing kabupaten/kota juga memiliki tim pemenangan yang diambil dari struktural DPC PDI Perjuangan setiap kabupaten/kota.

Pembahasan ini dilaksanakan pasca pendaftaran pasangan calon ke KPU Jawa Tengah, dalam forum *Legislator Summit* yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 Februari 2018 di Semarang. Forum ini dihadiri oleh seluruh anggota DPR RI dapil Jawa Tengah, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Tengah serta seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten dan Kota diseluruh Jawa Tengah dikumpulkan. Dalam acara tersebut dihadiri pula oleh Kepala Daerah dari kader PDI Perjuangan dan para pimpinan cabang partai.

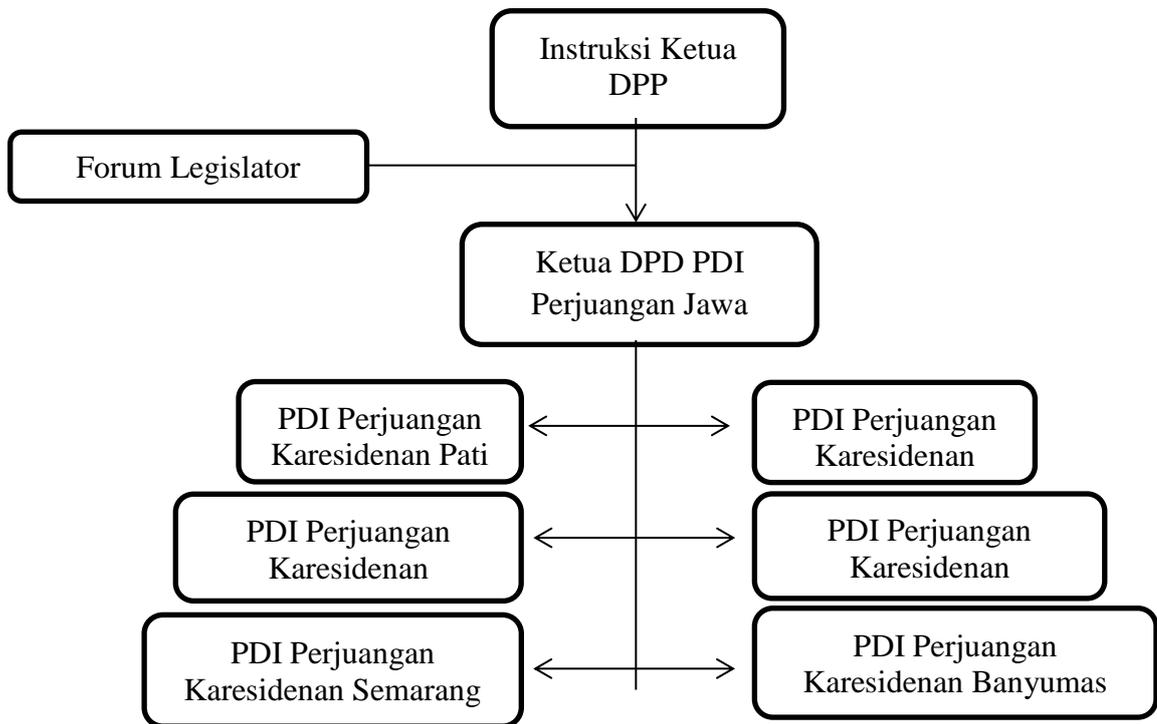
Dalam forum *Legislator Summit* DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah melakukan penugasan penempatan pasukan kepada setiap anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersinergi dan bergotong royong berjuang memenangkan Ganjar-Yasin sesuai dapilnya masing-masing dari tingkat Kabupaten hingga ranting/desa. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan

keamanan (Non Aktif) Puan Maharani menginstruksikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk bergotong royong memenangkan Ganjar-Yasin. Puan Maharani menginstruksikan untuk tiga pilar partai harus bersinergi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Instruksi untuk melaksanakan gotong royong dalam memenangkan pasangan Ganjar-Yasin dapat dijelaskan dengan bagan dibawah ini;

Bagan 2.3

Instruksi Gotong Royong PDI Perjuangan



Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2019

Bambang Wuryanto selaku ketua DPD PDI Perjuangan dalam *interview* yang dilaksanakan di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pada tanggal 29 September 2018 menjelaskan mengenai gotong royong memenangkan pasangan Ganjar-Yasin. Disatu sisi Ketua DPD PDI Perjuangan menjelaskan mengenai tantangan diawal masa kampanye, adanya isu Sara dalam Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi catatan penting bagi Jawa Tengah agar supaya tidak terjadi lagi dalam Pemilukada tahun 2018. Dalam wawancara beliau mengatakan;

“sudah ada penyebaran tabloid dengan isu sara yang berpotensi memecah belah bangsa, diwilayah pantai selatan kita pantau sudah mulai ada majalah yang diedarkan, mirip majalah Obor Rakyat, namanya Majalah Hidayah, untuk itulah kita membentuk Satuan Tugas (Satgas) NKRI”

Satgas NKRI ini dibentuk oleh struktural PDI Perjuangan untuk menumpas isu-isu sara dan perpecahan. Untuk menunjang mobilitas para anggota Satgas NKRI, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menyiapkan 40 unit mobil yang dibeli dari hasil Gotong Royong kader, 40 mobil yang dibeli jenis *single cabin dan double cabin*. Jumlah mobil *single cabin* yang disiapkan 35 mobil dimana semuanya diberikan ke 35 DPC PDI Perjuangan diseluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan 5 sisanya yang berjenis *double cabin* diberikan kelima partai koalisi pendukung pasangan Ganjar-Yasin.

Guna menunjang mobilitas para kader yang bertugas menjadi Satgas dalam Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018, DPD PDI Perjuangan menyiapkan 40 unit kendaraan *Single Cabin* dan *Double Cabin*. Ini merupakan suatu bentuk gotong royong yang dilakukan DPP PDI Perjuangan dalam menunjang mobilitas para Satgas yang nantinya akan bertugas mengamankan Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018. Dari 40 unit kendaraan tersebut selanjutnya diberikan kepada 35 DPC PDI Perjuangan dimasing-masing Kabupaten/Kota, lima sisanya diberikan kepada lima partai pengusung Ganjar-Yasin, yakni Golkar, Demokrat, PPP dan NasDem.

Dalam pemilukada Jawa Tengah mobil-mobil Satgas NKRI melaksanakan konvoi keliling kota dimana dilaksanakan Deklarasi kemenangan pasangan Ganjar-Yasin dalam Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018. Hal ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk mempermudah mobilisasi Satgas NKRI saat bertugas dilapangan. Pembentukan Satgas NKRI ini juga diilhami dari instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai petugas anti sara didalam setiap agenda atau aktivitas politik.

Gambar 2.1

Mobil Satgas NKRI PDI Perjuangan



Sumber: Asatu.id

Gambar diatas merupakan penampakan mobil yang dibeli untuk mempermudah mobilitas petugas Satgas NKRI dalam melaksanakan tugas dilapangan dalam mengamankan jalanya Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018. Mobil yang dibeli adalah mobil baru hasil gotong royong kader PDI Perjuangan dimana keseluruhan pembiayaan dikelola secara internal oleh struktural Bendahara PDI Perjuangan Jawa Tengah.